

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh adat Batak terhadap hak perempuan dalam pembagian harta warisan, ditinjau dari perspektif hukum perdata di Indonesia. Meskipun secara normatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjamin kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan (Pasal 832 dan 852), realitas sosiologis di kalangan masyarakat Batak Toba menunjukkan dominasi sistem kekerabatan patrilineal. Sistem adat ini secara tradisional mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris utama dan penerus marga, sementara hak perempuan (*boru*) atas harta warisan, khususnya aset tidak bergerak seperti tanah, seringkali dibatasi atau diwujudkan dalam bentuk pemberian lain. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis konflik norma antara hukum positif dan hukum adat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hak waris perempuan Batak Toba di Desa Markanding, Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan mengkombinasikan studi literatur dan wawancara mendalam dengan tokoh adat. Hasil penelitian menegaskan bahwa praktik pembagian warisan adat sering bertentangan dengan prinsip kesetaraan KUHPerdata. Anak perempuan umumnya menerima porsi lebih kecil, yang mengindikasikan adanya diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya harmonisasi melalui upaya sosialisasi hukum yang intensif untuk menjembatani jurang antara tradisi dan jaminan konstitusional, demi tercapainya keadilan substantif bagi perempuan Batak.

Kata Kunci: Hukum Waris, Adat Batak, Hukum Perdata, Patrilineal, Pewarisan.

ABSTRACT

This study examines the influence of Batak customs on women's rights in the distribution of inheritance, reviewed from the perspective of civil law in Indonesia. Although the Civil Code (KUHPerdota) normatively guarantees equal inheritance rights between men and women (Articles 832 and 852), the sociological reality among the Batak Toba community shows the dominance of the patrilineal kinship system. This customary system traditionally prioritizes sons as the main heirs and successors of the clan, while women's (boru) rights to inheritance, especially immovable assets such as land, are often limited or realized in the form of other gifts. The main objective of this study is to analyze the conflict between positive law and customary law, as well as to identify the factors that influence the implementation of Batak Toba women's inheritance rights in Markanding Village, Muaro Jambi Regency. The method used is juridical-empirical, combining literature study and in-depth interviews with customary leaders. The results of the study confirm that the practice of customary inheritance distribution often conflicts with the principle of equality in the Civil Code. Daughters generally receive a smaller share, which indicates discrimination in access to economic resources. This study concludes that harmonization through intensive legal socialization efforts is important to bridge the gap between tradition and constitutional guarantees in order to achieve substantive justice.

Keywords: Inheritance Law, Batak Customs, Civil Law, Patrilineal, Inheritance